



Jakarta, May 22, 2023

**Semuel A Pangerapan**

Director General of Application Information Technology  
Ministry of Communication and Information Technology  
Jalan Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta

Dear DG Semmy,

We hope this letter finds you well. We, the undersigned business associations representing major US investors, operators and associated businesses in the cloud technology sector, are writing to share our early views regarding data classification for Public Electronic Service Providers (ESPs). This follows our recent engagement with you during the AmCham Indonesia/US Chamber Financial Services and Information Technology Mission held on March 14, and a meeting at the US Embassy the following day, at which you shared some planned provisions from the Draft Ministerial Regulation on Public Sector ESP.

We understand the Ministry is proposing four categories of data under the regulation:

- Highly confidential (*sangat rahasia*)
- Confidential (*rahasia*)
- Limited (*terbatas*)
- Open (*terbuka*).

We suggest that policymakers adopt a broader approach to public sector data that can migrate to the cloud, given the advanced security and data protection offered by cloud service providers. The experience of governments around the world, including Australia, Japan, Singapore, the UK, and the US, shows all types of data can migrate to the cloud provided there are appropriate safeguards in place to achieve the required data security. Cloud service providers demonstrate such capability through their compliance with internationally recognized standards and certifications.

**We therefore propose that Indonesia allow wider categories of data to be managed by third party cloud service providers, including open, limited, and confidential categories.**

In a recent study, (Data Management Practices and Policies in Government, 2022) the Asian Development Bank recommended allowing cross-border data flow and the establishment of flexible data classifications while maintaining high standards of cybersecurity. A 2023 World Bank report on the Data Classification Matrix and Cloud Assessment Framework breaks down levels and boundaries of data classification, proposes cloud security requirements for public data, and suggests an extensive list of public data management standards and checklists for vendors. Both reports recognize the importance of effectively managing public data to improve public services, and suggest that governments around the world adopt international best practices and utilize public-private partnerships. Last year's G20 Bali Leaders Declaration

also encouraged member states to support cross border data flow and the adoption of cloud computing technology to accelerate digital transformation.

Data classification will require joint efforts across all public sector agencies with oversight and guidance from the Ministry. This will be important in determining sensitive data requirements and implementing the related infrastructure and services. Public sector agencies would therefore be responsible for classifying the sensitivity of their data (including legacy data) following a principles-based and risk-based approach to data privacy and security.

As our members include the world's leading cloud service providers we are happy to share and best practices for e-government data classification and governance. We hope to assist the Ministry in maintaining the highest level of data protection, while also encouraging innovation and technological advancements in the public sector. We will continue to participate in public consultations related to public sector ESPs to support an efficient and effective transition to e-government.

We are eager to meet with you and your team to discuss this further at your convenience. Peter Lie ([peter.lie@amcham.or.id](mailto:peter.lie@amcham.or.id) or +62852 1492 8980) will be our point of contact with your office to follow up. Thank you for your time and attention.

Sincerely,



**A Lin Neumann**  
**Managing Director**  
American Chamber  
of Commerce



**John Goyer**  
**Executive Director,**  
**Southeast Asia**  
U.S. Chamber of  
Commerce



**Jared Ragland**  
**Senior Director,**  
**Policy - APAC**  
BSA | The Software  
Alliance

CC:

**Minister of Communication and Information Technology**  
Ministry of Communication and Information technology  
Jalan Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta

**Mira Tayyiba**  
Secretary General  
Ministry of Communications and Information Technology  
Jalan Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta



Jakarta, May 22, 2023

**Kepada Yth.**

**Bapak Samuel A. Pangerapan**

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta

Yang Terhormat Bapak Semmy,

Kami, atas nama asosiasi bisnis mewakili investor, praktisi dan asosiasi bisnis Amerika Serikat (AS) di sektor teknologi *cloud computing*, menulis surat ini untuk berbagi pandangan terkait klasifikasi data untuk Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik. Surat ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan Bapak pada kegiatan Financial Services and Information Technology Mission yang diselenggarakan AmCham Indonesia dan US Chamber tanggal 14 Maret, dan pertemuan berikutnya di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta; dimana Bapak menjelaskan beberapa ketentuan rancangan peraturan Menkominfo terkait Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik.

Kami memahami kementerian mengajukan empat klasifikasi data dalam rancangan peraturan ini, di antara lain:

- Sangat Rahasia;
- Rahasia;
- Terbatas;
- Terbuka.

Kami menyarankan para pembuat kebijakan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap data lingkup publik yang dapat bermigrasi ke *cloud computing*, mengingat kapabilitas keamanan dan perlindungan data yang ditawarkan oleh penyedia layanan *cloud computing*. Pengalaman dari banyak pemerintah di seluruh dunia, termasuk Australia, Jepang, Singapura, Inggris, dan AS, menunjukkan semua jenis data dapat bermigrasi ke *cloud computing* selama kerahasiaan, kepercayaan, ketersediaan, dan integritas data dapat dilindungi. Penyedia layanan *cloud computing* dapat menunjukkan kemampuannya melalui sertifikasi-sertifikasi yang diakui secara internasional yang sudah mereka terapkan.

**Oleh karena itu, kami mengusulkan agar Indonesia mengizinkan kategori data yang lebih luas untuk dikelola oleh penyedia layanan *cloud computing* pihak ketiga, termasuk kategori terbuka (*open*), terbatas (*limited*), dan rahasia (*secret*).**

Dalam studi terbaru (*Data Management Practices and Policies in Government, 2022*), Asian Development Bank (ADB) merekomendasikan untuk mengizinkan arus data lintas negara/*cross-border data flows* dan klasifikasi data yang fleksibel dengan tetap mempertahankan standar tinggi keamanan siber. Laporan *World Bank 2023* berjudul *Data Classification Matrix and Cloud Assessment Framework* menguraikan tingkat dan

batasan klasifikasi data, mengusulkan persyaratan keamanan *cloud* untuk data lingkup publik, dan menyarankan beberapa standarisasi untuk manajemen data publik dan vendor. Kedua laporan ini mengakui pentingnya mengelola data publik secara efektif untuk meningkatkan layanan publik, dan menyarankan agar pemerintah di seluruh dunia mengadopsi praktik terbaik bertaraf internasional dan memanfaatkan kemitraan publik-swasta. Selain itu, Deklarasi Pemimpin G20 Bali tahun lalu mendorong negara-negara anggota untuk mendukung arus data lintas negara dan adopsi teknologi *cloud computing* untuk mempercepat transformasi digital.

Klasifikasi data membutuhkan upaya bersama semua lembaga sektor publik dengan pengawasan dan bimbingan dari kementerian. Hal ini penting dalam menentukan persyaratan data sensitif dan mengimplementasikan infrastruktur dan layanan terkait. Oleh karena itu, lembaga sektor publik akan bertanggung jawab untuk mengklasifikasi sensitivitas data mereka (termasuk data lama) mengikuti pendekatan berbasis prinsip dan berbasis risiko terhadap privasi dan keamanan data.

Melihat anggota perusahaan kami termasuk penyedia layanan *cloud computing* terbaik di dunia yang telah mendukung banyak inisiatif *e-government* di berbagai negara, termasuk AS, kami siap untuk berbagi dan berdiskusi terkait contoh kasus dan praktik terbaik klasifikasi dan tata kelola data dalam *e-government*. Kami ingin membantu kementerian dalam menjaga tingkat perlindungan data yang baik sekaligus mendorong inovasi dan kemajuan teknologi di sektor publik. Kami akan terus berpartisipasi dalam konsultasi publik terkait rancangan peraturan PSE Lingkup Publik untuk mendukung transisi yang efisien dan efektif ke *e-government*.

Kami bersedia untuk bertemu dengan Bapak dan tim untuk membahas hal ini lebih lanjut. Peter Lie ([peter.lie@amcham.or.id](mailto:peter.lie@amcham.or.id) atau +62852 1492 8980), akan menjadi narahubung dengan tim Bapak untuk tindak lanjut berikutnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.

Salam,



**A Lin Neumann**  
**Managing Director**  
American Chamber  
of Commerce



**John Goyer**  
**Executive Director,**  
**Southeast Asia**  
U.S. Chamber of  
Commerce



**Jared Ragland**  
**Senior Director,**  
**Policy - APAC**  
BSA | The Software  
Alliance

CC:

**Menteri Komunikasi dan Informatika**

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta

**Ibu Mira Tayyiba**

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta